



# PRO PATRIA

Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik

<http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria>

P-ISSN: 2622-9862 E-ISSN: 2622-707X

Vol. 8 No.1, Februari 2025



## Partisipasi Perempuan Dalam Kepemimpinan Sebagai Kepala Desa Di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Banten

Ade Millatus Saádiyyah\*, Gita Indri Andiyani  
Universitas Banten Jaya  
Serang, Indonesia

### Article History:

Submitted: 12-02-2025

Revised: 24-02-2025

Accepted: 06-03-2025

### Abstract

*This research was conducted in Pancanegara Village, Pabuaran District, Serang Regency, with the aim of 1) To find out the low number of women in village government leadership. 2) To find out what are the challenges of women's participation in the local political process. 3) To find out the strategy of increasing women's participation in local politics. The research method used is descriptive analysis research with a qualitative approach/information directly from information sources that are considered related to Women's Participation in Leadership as Village Heads in Pancanegara Village, Pabuaran District, Serang Regency, The informants/resource persons were the Head of Pancanegara Village, Pancanegara Village Staff and several Pancanegara Village communities. The results of this study show the lack of participation of women in local politics or as village heads in Pancanegara Village. Lack of awareness in the community where the community considers women to be less professional in their work. The conclusion of this study is that the Village Head has made efforts to increase women's participation in local politics in Pancanegara Village. Village heads and village governments have carried out several activities to increase women's interest in participating in local politics.*

### Keywords:

*Women's Participation,  
Leadership, Village Head*

\*Corresponding Author:

Ade Millatus Saádiyyah

Universitas Banten Jaya, Serang, Indonesia

Email address: ade.millatus@gmail.com

## PENDAHULUAN

Keterlibatan perempuan dalam masa kepemimpinan kepala desa dengan gender perempuan baik diruang publik maupun politik disampingkan. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya angka perempuan yang terlibat dalam proses kegiatan di desa, sedikitnya perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan adanya pandangan perbedaan gender didalam masyarakat sehingga terbentuknya ketidakadilan atau ketimpangan bagi perempuan. Peran perempuan dalam masa kepemimpinan kepala desa laki-laki lebih kepada urusan domestik dan pekerja rumah tangga tambahan. Kurang perhatian dari pemerintah desa semakin membuat peran perempuan terpinggirkan. Menurut Supartiningsih (2003:10), data statistik di seluruh dunia selalu menunjukkan bahwa angka partisipasi perempuan dalam pasar kerja dan politik selalu lebih kecil dari laki-laki. Menurut Astuti, (2011: 16), fakto utama yang menghambat kesempatan perempuan untuk terjun kedalam dunia politik yaitu pandangan bahwa dunia politik adalah dunia keras, memerlukan akal, dunia yang penuh debat dan membutuhkan pikiran-pikiran cerdas, yang semuanya diasumsikan milik laki-laki bukan milik perempuan. Perempuan tidak pantas berpolitik karena perempuan adalah penghuni dapur atau domestik, tidak bisa berfikir rasional dan kurang berani mengambil resiko, semuanya

itu sudah menjadi stereotip perempuan (Penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok dimana orang tersebut dapat dikategorikan).

Dalam beberapa dekade terakhir ini, masalah keterwakilan perempuan dalam dunia politik di Indonesia menjadi suatu wacana yang penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tidak memberikan batasan akan partisipasi dan representasi politik kaum perempuan, karena keterlibatan kaum perempuan dalam bidang politik merupakan salah satu bentuk nyata dari perwujudan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama dalam pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Walaupun secara normatif UUD 1945 telah menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara, baik perempuan maupun laki-laki namun kaum perempuan belum memperoleh manfaat yang signifikan dan optimal dalam hasil pembangunan nasional. Dalam konvensi tentang hak-hak politik perempuan pasal 1 dinyatakan :

perempuan berhak memberikan suara dalam semua pemilihan dengan status sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi. (Calesna et al. 2020:223-224)

Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah merupakan salah satu tema besar yang selalu muncul dalam diskursus mengenai reposisi peran perempuan dalam pembangunan dan politik. Salah satu aspek yang selalu muncul dalam diskursus ini adalah persoalan representasi kaum perempuan dalam struktur politik nasional maupun daerah, termasuk pula melibatkan perempuan dalam proses perumusan kebijakan publik dipusat hingga daerah yang dirasakan belum cukup memadai. Persoalan ini muncul terutama bila membandingkannya secara dikotomis dengan eksistensi kaum perempuan dalam konteks kuantitatif yang rata-rata sebanding dengan setengah populasi nasional maupun daerah.

Pemimpin daerah di berbagai wilayah Indonesia mulai dihiasi dari kalangan perempuan walaupun dari jumlah persentase masi terbilang minim sedikitnya 5,35%. Setidaknya hal ini menandakan adanya kemajuan demokrasi Indonesia atas partisipasi politik dari perspektif gender, sebagaimana Hatta memaknai demokrasi sebagai pembebasan individu dari segala bentuk kekangan tradisi. Dan salah satu tradisi yang mengekang adalah tembok patriarki.

Berbanding berbalik jika kita kembali melihat pada situasi sosial politik di rezim orde baru, dimana perempuan memiliki ruang gerak yang sempit untuk masuk pada sektor-sektor publik terkhusus ranah politik yang acap kali kali dianggap keras dan kotor. Idiologi patriarki dan streatip gender yang ditumbuhkan oleh rezim orde baru, membangun kontruksi sosial dimana perempuan lebih pantas menjadi ibu dan istri yang baik sebagai konsekuensi dari "kodrat" perempuan penyelenggaraan pilkada langsung di era reformasi, membuka arus peluang kepemimpinan perempuan menjadi kepala daerah. Jika sebelumnya laki-laki dianggap mampu mengakomodir kebutuhan perempuan dengan tanpa harus melibatkan partisipasi langsung dari perempuan, maka saat ini keterlibatan langsung menjadi penting karena pada dasarnya kepentingan berbasis gender mereka berbeda, yaitu kepentingan yang terbentuk secara kolektif sebagai hasil dari kontruksi peran gender dan hubungan antar gender.

Di Indonesia ada banyak 1.084 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari total keseluruhan daerah tingkat provinsi dan kota/kabupaten, dan sedikitnya 59 kepala daerah yang berasal dari kalangan perempuan. Salah satunya provinsi dengan kepala daerah perempuan terbanyak adalah Banten. Dari delapan wilayah Kabupaten/Kota di Banten, empat

diantaranya dipimpin oleh perempuan, antara lain Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, Bupati Pandeglang Irna Nerulita, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan Walikota Tangerang Selatan Airin Rahma Diany.

Dari segi persentasi kepemimpinan politik perempuan, ini menjadi kemajuan tersendiri bagi Banten yang notabene masi kental dengan nilai dan kultur agamis. Banten bahkan menjadi provinsi pertama yang memiliki kepala daerah perempuan pertama di Indonesia. Setidaknya ini menandakan resistensi terhadap perempuan berpolitik di Banten sudah berkurang dan secara perlahan membuka kotak pandora dunia politik yang belum ramah terhadap kelompok marginal seperti perempuan.

Hanya saja yang menjadi persoalan adalah partisipasi politik perempuan di Banten menopong bangunan kokoh politik dinasti. Seluruh kepala daerah perempuan di kabupaten/kota di Banten memiliki hubungan kekeluargaan dengan pejabat atau kepala daerah yang sedang dan/ sudah tidak lagi menjabat. Kepala daerah perempuan yang terpilih cenderung karena latar belakang patriarki.

Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 28D ayat 1 berbunyi "setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum". Dalam ayat 3 yang berbunyi "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Artinya, laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama dihadapan hukum, berperan dalam dunia politik, pendidikan, kesehatan dan dalam bentuk apapun demi kemajuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. (Kontu 2017:13)

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 poin 2 UU No 23 Tahun 2014).

Pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (Pasal 1 poin 3 UU No TAHUN 2014)

Keterlibatan perempuan dalam politik dapat dilihat dari dua indikator. Pertama, keterlibatan dalam lembaga legislatif. Kedua, keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan baik dalam lembaga eksekutif maupun dalam struktur pemerintahan. Dengan adanya keterlibatan kaum perempuan dalam politik dan dengan adanya pemahaman yang cukup mengenai perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki akan mempengaruhi proses

pengambilan keputusan yang akan membawa dampak signifikan untuk kaum perempuan. Partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan salah satu langkah nyata untuk mencapai kondisi yang adil bagi perempuan. Dengan hadirnya sosok pemimpin perempuan akan merespon kepentingan perempuan dalam kebijakan sehingga akan melahirkan kebijakan yang berkeadilan dan kesetaraan gender.

Dalam konteks paradigma tentunya dalam kepemimpinan tidak ada ketentuan jenis kelamin, artinya bahwa dalam kepemimpinan tidak hanya melibatkan jenis kelamin laki-laki saja akan tetapi bagi perempuanpun boleh ikut serta di dalamnya sebagai pengendalian pembangunan. Sedikitnya perempuan yang terlibat dalam dunia politik, sehingga sebagian besar perempuan berada dalam sektor domestik. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat terhadap perempuan. Dengan demikian, partisipasi perempuan untuk terjun dalam dunia politik terhambat dan mengakibatkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam dunia politik.

Partisipasi perempuan dalam bidang politik sebenarnya sangat diperlukan, namun partisipasi untuk terlibat dalam dunia politik masih rendah. Tidak hanya di bidang politik, partisipasi perempuan dalam suatu

kepemimpinan juga masih kurang. Dalam hal kepemimpinan, perempuan kurang berpartisipasi sehingga sebagian besar pemimpin adalah laki-laki, hal ini dapat dicontohkan dengan rendahnya partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dalam politik.

Partisipasi politik perempuan Partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi. Yang penting, partisipasi politik merupakan proses aktif: seseorang mungkin menjadi anggota sebuah partai atau kelompok penekan, namun tidak memainkan peran aktif dalam organisasi.

Tindakan keterlibatan aktif termasuk partisipasi politik konvensional, seperti memberikan suara, menduduki jabatan tertentu, berkampanye untuk sebuah partai politik atau berkontribusi dalam manajemen koperasi perumahan masyarakat, maupun tindakan inkonvensional, yang bisa dianggap absah, seperti menandatangani petisi atau mengikuti demonstrasi damai, atau yang ilegal, seperti protes dengan kekerasan atau menolak membayar pajak (Faulks 2010: 226-227).

Partisipasi politik perempuan, saat ini sangat dibutuhkan dalam upaya

pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai Kebijakan publik (Susanti, 2015:3). Partisipasi perempuan adalah bicara tentang bagaimana perempuan mengakses ranah politik. Bicara tentang bagaimana perempuan 'merebut kursi' dalam ranah parlemen yang masih sangat dikuasai oleh rezim patriarki bahkan ranah politik saja cenderung dikonotasikan sebagai ranah maskulin yang patriarki. Asumsinya, rendahnya partisipasi dan peran substantif perempuan di ranah politik berbanding lurus dengan realisasi potensi yang mereka miliki untuk menyuarakan kepentingan dan hak-hak perempuan (Dedees, 2016:321-322)

Upaya memberdayakan perempuan perlu terus dilakukan agar mereka tidak terjebak sebagai objek melainkan dapat berperan sebagai subjek dan memberikan seluruh potensinya dalam proses pembangunan. Untuk itu keterlibatan perempuan dalam kelembagaan desa mutlak diperlukan agar dalam proses pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan kepentingan kaum perempuan. Keterlibatan perempuan dalam sektor publik ini akan memberikan peluang terhadap pemecahan masalah-masalah perempuan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan mereka.

Dengan melibatkan perempuan dalam kelembagaan desa juga mempunyai arti memberi kesempatan kepada kaum perempuan dalam tanggungjawab sosialnya selain itu potensi yang dimiliki perempuan

dapat bermanfaat bagi masyarakat. Untuk menjadi strategis dengan melibatkan perempuan dalam proses pembangunan melalui kelembagaan desa dari penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sehingga ada keseimbangan antara perempuan dengan laki-laki mengingat pada sekarang ini sudah diberlakukannya kesetaraan gender (Jurnal Endang Widayati, 2015:156).(Calesna et al. 2020:225)

Sudah menjadi budaya yang turun-temurun menempatkan peran perempuan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik, sehingga mengakibatkan akses dan partisipasi perempuan dalam dunia politik sangat rendah. Konsekuensi yang kemudian terjadi adalah jika dilihat dari sudut pandang hak dan kewajiban perempuan dalam kehidupan bernegara, seorang perempuan berhak untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik, bahkan untuk menjadi seorang pemimpin.

Namun realitanya masih banyak masyarakat yang menganggap keterwakilan perempuan dalam dunia politik adalah sesuatu yang kurang mendapat respon positif. Di sini nampak sekali terjadi ketidakadilan gender dalam dunia politik.(Suare Marcillo 2012:316) Hambatan politik perempuan berbagai hasil penelitian yang mengungkapkan mengenai hambatan politik perempuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sossou (2011:34) menyatakan bahwa kurangnya dukungan politik untuk kandidat dari perempuan. Hal ini menegaskan bahwa norma budaya dan sikap pada perempuan yang berkontribusi terhadap kekurangan program pelatihan berorientasi pada kepemimpinan dan pendidikan politik. (Kollo Fredik Lambertus 2017:287)

Berdasarkan hasil observasi awal/pra penelitian ditemukan fakta bahwa masih kurangnya partisipasi perempuan untuk ikut serta dalam politik lokal terutama menjadi kepala desa di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Banten, kurang minatnya perempuan untuk terjun ke dunia pemerintahan daerah, masyarakat yang menilai laki-laki lebih baik untuk menjadi seorang pemimpi, perempuan di anggap kurang mampu untuk menjadi seorang pemimpin.

Kurangnya partisipasi perempuan dalam kepemimpinan kepala desa di desa pancanegara ini sangat rendah, kurangnya partisipasi perempuan ikut serta dalam urusan pemerintahan daerah terutama di desa pancanegara, Keterlibatan perempuan dalam masa kepemimpinan kepala desa laki-laki baik diruang publik maupun politik disampingkan. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya perempuan terlibat dalam kegiatan desa, sedikitnya perempuan yang

terlibat dalam pengambilan keputusan dan adanya pandangan perbedaan gender didalam masyarakat sehingga menimbulkan bentuk ketidakadilan/ ketimpangan bagi perempuan di Desa Pancanegara.

Peneliti melihat dimana Masyarakat Desa Pancanegara masih banyak yang memandang bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari tetapi dalam segala hal termasuk dalam dunia politik dan kepemimpinan. Bila diamati lebih teliti, budaya patriarki masih melekat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari struktur kepengurusan di tingkat desa yang didominasi oleh kaum laki-laki meskipun cukup banyak perempuan di desa ini yang memiliki keahlian dan pendidikan yang tinggi.

Kepala desa belum pernah sekalipun dijabat oleh seorang perempuan karena memang sampai saat ini belum ada perempuan yang ikut mencalonkan diri sebagai kepala desa. Berdasarkan alasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul partisipasi perempuan dalam kepemimpinan sebagai kepala desa di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Banten.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam daftar alamiah. Dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seorang individu melihat, memaknai, atau menggambarkan dunia sosialnya. Pemahaman ini merupakan hasil interaksi sosialnya. Memahami merupakan esensi dari penelitian kualitatif. Secara sederhana, proses memahami sangat mudah diucapkan, tetapi sesungguhnya sangat sulit untuk dilakukan dengan sebenarnya (Sudaryono, 2017:91).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Deskripsi Umum Desa Pancanegara

#### Kecamatan Pabuaran

Awalnya Desa Pancanegara dulunya masih bergabung dengan Desa Pabuaran, Namun sejak tahun 1977 ada pemekaran dan lahirlah Desa Pancanegara. Pada awal berdirinya Desa Pancanegara dipimpin oleh Kades M Amun. Desa Pancanegara terdiri dari 9 (sembilan) RW dan 24 (dua puluh empat) RT. Pada dasarnya desa pancanegara adalah desa yang subur itu terlihat dari lahan pertanian yang sangat luas dan subur. Dalam kurun waktu dari 1977 sampai sekarang

Desa Pancanegara sudah melakukan pergantian Kepala Desa sebanyak 7 kali dan yang paling terakhir dipimpin oleh kepala Desa H Ade Suhendra.

#### a. Demografi

##### 1) Batas Wilayah

**Tabel 1**

**Batas Wilayah Desa Pancanegara  
Kecamatan Pabuaran**

No	Batas Wilayah	Nama Wilayah
1	Sebelah Utara	Desa Sindang Heula
2	Sebelah Selatan	Kec. Baros
3	Sebelah Timur	Kec. Taktakan
4	Sebelah Barat	Desa Pabuaran

(Sumber: Profile Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran)

##### 2) Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)

**Tabel 2**

**Jarak Pusat Pemerintahan**

No	Orbitasi	Jarak
1	Jarak ke kecamatan terdekat	4 km
2	Jarak dari pusat pemerintahan kota administratif	15 km
3	Jarak dari Ibu kota Kabupaten	15 km
4	Jarak dari Ibu kota Kabupaten Serang	8 km
5	Jarak dari Ibu kota Negara	114 km

(Sumber: Profile Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran)

##### 3) Luas Wilayah

Luas Wilayah Desa Pancanegara adalah 544,88 Ha, dengan penggunaannya sebagai berikut:

**Table 3**  
**Luas Wilayah Desa Pancanegara**  
**Kecamatan Pabuaran**

Wilayah	Luas
Pemukiman	56,10 Ha
perkantoran	2,60 Ha
pertanian	48,023 Ha
perkebunan	297 Ha
perternakan	-
perikanan	-
Fasilitas	9,70 Ha
Fasilitas Sosial	-

(Sumber: Profil Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran)

#### 4) Topografi Desa

Secara umum keadaan Desa Pancanegara merupakan daerah dataran rendah, dengan ketinggian 100 meter diatas permukaan laut. Desa Pancanegara mempunyai iklim Tropis sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap aktivitas pertanian dan pola tanam di desa ini.

#### b. Keadaan Sosial

##### 1) Jumlah penduduk :

**Table 4 Jumlah Penduduk Desa Pancanegara**

No	Nama	Jumlah
1	Jenis Kelamin <ul style="list-style-type: none"> <li>Laki-laki</li> <li>Perempuan</li> </ul>	3.300 Orang 3.200 orang

2	Kepala Keluarga	1615 KK
3	Kepala Keluarga RTM	800 KK
4	Kewarganegaraan <ul style="list-style-type: none"> <li>WNI</li> <li>WNA</li> </ul>	6.500 Orang - Orang

(Sumber: Profile Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran)

Jumlah penduduk di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran berjumlah 6.500 orang semuanya berkewarganegaraan Indonesia, terdapat laki-laki berjumlah 3.300 orang dan perempuan berjumlah 3.200 orang. Selain itu terdapat kepala keluarga berjumlah 1281 KK (Kartu Keluarga).

##### 2) Jumlah Penduduk Menurut Agama

**Tabel 5**  
**Jumlah penduduk menurut agama**  
**Desa Pancanegara**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	6.500 Orang
2	Kristen	- Orang
3	Katholik	- Orang
4	Hindu	- Orang
5	Budha	- Orang

(Sumber: Profile Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran)

##### 3) Jumlah Penduduk Menurut Usia

###### a. Kelompok Pendidikan

**Table 6**  
**Jumlah penduduk menurut usia Desa Pancanegara**

No	Usia	Jumlah
1	04 – 06 tahun	517
2	07 – 12 tahun	657
3	13 – 15 tahun	1158

(Sumber: profile Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran)

b. Kelompok Tenaga Kerja

**Table 7**  
**Jumlah Penduduk Tenaga Kerja Desa Pamcanegara**

No	Usia	Jumlah
1	20 – 26 tahun	1478 Orang
2	27 – 40 tahun	1967 Orang

(Sumber: Profile Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran)

4) Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkakan tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan demikian akan membantu program pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya

akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Di bawah ini data yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran.

**Tabel 8**  
**Jenis Pendidikan dan Jumlah Desa Pancanegara**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana	60 Orang
2	SLA	670 Orang
3	SMP	850 Orang
4	SD	1050 Orang
5	Tidak menyelesaikan pendidikan	150 Orang

(Sumber: Profile Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran)

a. Keadaan Ekonomi

Sebagian besar penduduk Desa Pancanegara bekerja disektor pertanian. Hal ini didukung oleh factor iklim dan kondisi lahan pertanian yang subur.

1) Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

**Tabel 9**  
**Jumlah penduduk menurut mata pencarian Desa Pancanegara**

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Karyawan/ABRI/PNS	41 Orang
2	Wiraswasta/pedagang	91 Orang

3	Tani	500 Orang
4	Pertukangan	- Orang
5	Buruh Tani	493 Orang
6	Pensiunan	- Orang
7	Nelayan	- Orang
8	Pemulung	- Orang
9	Jasa	- Orang

(sumber: Profile Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran)

Penduduk di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran menurut mata pencaharian paling banyak yaitu berprofesi sebagai tani sekitar 500 orang dan yang paling rendah yaitu nelayan 0 orang.

#### b. Kondisi Pemerintahan Desa

- 1) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

**Tabel 11**  
**Perangkat Desa Pancanegara**  
**Kecamatan Pabuaran**

Perangkat Desa	Jumlah
Kepala Desa	24 Orang
Kepala Urusan	9 Orang
Pembantuan Kepala Urusan	9 Orang

( Sumber: profile Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran)

Perangkat Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran terdiri dari kepala Desa yang berjumlah 1 orang, Sekretaris Desa berjumlah 1 orang dan perangkat desa berjumlah 6 orang.

#### c. Visi Misi Desa Pancanegara

- 1) Visi

Untuk masa lima tahun ke depan Desa Pancanegara merencanakan pembangunan di segala bidang, agar kesejahteraan masyarakat yang selama ini di cita-citakan dapat segera terwujudkan, adapun visi desa pancanegara untuk lima tahun kedepan **“mewujudkan Desa Pancanegara menjadi desa yang “mandiri” bersih, sehat, pandai, taqwa dan berkarya”**

#### 2) Misi

Untuk mewujudkan masyarakat Desa Pancanegara yang “mandiri” , maka pembangunan yang harus dilaksanakan adalah pembangunan disemua bidang dan menyentuh semua unsure/lapisan masyarakat.

Adapun langkah-langkah yang akan di ambil demi mensukseskan misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pembangunan di sisi ekonomi
- b) Pembangunan dalam sector pendidikan
- c) Pendidikan agama harus ditingkatkan
- d) Adanya pembangunan yang berkelanjutan

Kenapa Desa Pancanegara mengambil langkah-langkah yang tersebut diatas, karena ketiga

langkah yang paling atas sangat berkaitan erat dan harus seimbang, karena kita ketahui bersama kemajuan teknologi pada saat ini sangat pesat sehingga kalau tidak diimbangi dengan pembangunan di sector agama ditakutkan moral masyarakat akan merosot.

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dan wawancara secara langsung dengan kepala desa dan beberapa masyarakat di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang. Peneliti menemukan hasil observasi dan wawancara sebagai berikut. Di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran terdapat banyak persepsi masyarakat mengenai perempuan untuk menjadi seorang pemimpin kepala desa.

#### 1. Hasil Temuan Observasi dan Wawancara

Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, peneliti mengajukan permohonan ijin meneliti di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran kepada Bapak Seketaris Desa. Peneliti menemui langsung Bapak Seketaris Desa di Kantor Desa Pancanegara untuk meminta ijin melakukan penelitian. Selain itu peneliti juga meminta ijin kepada Bapak RT/RW setempat untuk melakukan penelitian.

Bapak Lurah dan ketua RT/RW langsung menyetujui dan memberikan respon positif setelah membaca surat pengantar yang dibuat oleh kampus Universitas Banten Jaya. Setelah diberikan ijin dari Bapak Lurah dan Ketua RT/RW dilokasi Desa Pancanegara, hari-hari berikutnya peneliti langsung melakukan penelitian dilokasi tersebut.

Observasi dilakukan pada tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan 31 Juli 2024, untuk mengamati kurangnya partisipasi perempuan dalam kepemimpinan sebagai kepala desa. Observasi ini dilakukan bersamaan dengan dilakukannya wawancara. Dengan demikian dapat diketahui mengenai persepsi masyarakat terhadap partisipasi perempuan dalam pemerintahan daerah. Hasil observasi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 12**

#### **Hasil Observasi Mengenai Kurangnya Partisipasi Perempuan Dalam Kepemimpinan Sebagai Kepala Desa Di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran**

No	Aspek yang di amati	Ya	Kurang	Tidak
1	Kepala Desa memberikan motivasi terhadap	✓		

	perempuan di desa pancanegara			
2	Membina para remaja perempuan untuk belajar tentang politik lokal Di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran	✓		
3	Memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat		✓	
4	Lebih mengutamakan laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin			✓
5	Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan desa	✓		
6	Pemerintah desa selalu mengapresiasi terhadap para perempuan yang ikut serta dalam pemerintahan desa		✓	

Berdasarkan tabel diatas, data hasil penelitian yang peneliti peroleh di deskripsikan bahwa persepsi masyarakat tentang kurangnya partisipasi perempuan dalam kepemimpinan sebagai Kepala Desa cukup baik. Dapat dilihat pada tabel

didasar hasil observasi yang peneliti amati dari berbagai sisi selama proses penelitian berlangsung. Dari hasil observasi tersebut membuktikan bahwa masyarakat menganggap perempuan cukup baik.

Dari hasil observasi tersebut membuktikan bahwa Masyarakat dan pemerintahan desa berperan penting terhadap kurangnya partisipasi perempuan sebagai Kepala Desa di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang. Hal tersebut artinya bahwa masyarakat dan pemerintahan desa sudah mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran, ada beberapa perubahan dan perkembangan antara lain, *pertama* adanya pemberdayaan perempuan ialah upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap politik lokal , agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam pemerintahan desa, *kedua* pemerintah desa meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan berupa meningkatkan jumlah perempuan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan desa, *ketiga* sudah ada beberapa perempuan yang bekerja di pemerintahan desa sebagai staf desa. Akan tetapi peneliti

menemukan beberapa masalah yang ada di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran mengenai kurangnya partisipasi perempuan sebagai Kepala Desa, para remaja perempuan yang lebih memilih bekerja diluar seperti dipabrik karena kurangnya dari segi pendidikan, sehingga kurangnya remaja perempuan yang ikut serta dalam pemerintahan desa.

Hal ini pun di perjelas dalam wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada informan penelitian. Pada hari senin tanggal 20 mei 2024, peneliti mengajukan permohonan ijin meneliti di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Banten kepada sekretaris Desa, disitu peneliti menemui langsung sekretaris Desa Pancanegara untuk meminta ijin melakukan penelitian. Sekretaris desa menyampaikan surat permohonan ijin penelitian kepada kepala desa pancanegara, kepala desa menyetujui dan memberikan respon positif dan membaca surat pengantar yang dibuat oleh kampus Universitas Banten Jaya. Setelah diberikan ijin, peneliti langsung meminta jadwal untuk wawancara kepala desa dan staf desa serta beberapa msyarakat Desa Pancanegara, setelah itu peneliti dan bapak Kepala Desa Pancanegara memutuskan melakukan wawancara pada hari senin tanggal 3 juni 2024, wawancara kedua dilaksanakan pada hari selasa tanggal 10

juni 2024 dengan sekretaris desa dan staf desa, wawancara ke tiga dilaksanakan pada hari sabtu 15 juni 2024 dengan bapak RT 01 Kp. Rancabelut Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Banten, kemudian lanjut wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Pancanegara.

Data hasil temuan penelitian yang berjudul "*Partisipasi Perempuan Dalam Kepemimpinan Sebagai Kepala Desa*" yang diproses wawancara ini dengan informan penelitian yaitu dengan Bapak Kepala Desa, Staf Desa dan beberapa masyarakat Desa Pancanegara.

Adapun hasil temuan wawancara yang di peroleh dari data wawancara peneliti dengan Kepala Desa mengenai kenakalan remaja. Menurut informan 1 selaku Kepala Desa bahwa :

*Memang sampai sekarang masi banyak perempuan di desa pancanegara kurang berpartisipasi dalam politik lokal, yang sudah saya amati bahwasannya masyarakat disini kurang dalam pendidikan terlebih kepala pendidikan politik, pengetahuannya yang kurang dan keluarganya atau kpribadian perempuannya yang memilih kerja di luar ketimbang terjun ke politik lokal di Desa Pancanegara.*

Selanjutnya hal yang sama disampaikan pula oleh Hera sebagai remaja perempuan. Hera menjelaskan bahwa partisipasi prempuan menurutnya sebagai berikut:

*Menurut saya partisipasi perempuan di desa pancanegara memang kurang, saya pribadi sendiri sebagai salah satu remaja perempuan di Desa Pancanegara tidak mendapatkan pendidikan politik lokal, saya tamat sekolah sampai SMA saya tidak berminat ataupun tertarik masuk ke dalam politik lokal di Desa Pancanegara ini, saya lebih memilih kerja di luar.*

Dari berbagai hasil wawancara yang telah peneliti temukan seperti yang telah di jelaskan di atas bahwa memang Desa Pancanegara perempuannya masi kurang untuk berpartisipasi dalam politik lokal, banyaknya perempuan yang lebih memilih kerja diluar ataupun memilih untuk menikah, kurangnya partisipasi perempuan yang ada di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang ini sebagaimana hasil wawancara yang peneliti temukan tersebut berbagai banyak bentuknya seperti kurangnya dukungan dari keluarga sendiri, pemerintah daerah yang kurang dalam melakukan kegiatan-kegiatan kepada remaja perempuan di Desa Pancanegara, kurangnya minat perempuan untuk terjun ke dunia politik lokal. Informan tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, berikut penjelasannya: *Kurangnya partisipasi perempuan dalam politik lokal juga dikarenakan kurangnya kesadaran diri dan minat dalam diri perempuan, dalam lingkungan masyarakatnya ataupun dalam lingkungan keluarganya, seharusnya para remaja perempuan dapat dorongan dalam keluarga*

*untuk terjun dalam politik lokal di Desa Pancanegara ini, mencoba mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di Desa Pancanegara ini. Seharusnya peran orang tua juga penting meberi dukungan kepada anaknya yang memiliki remaja perempuan di keluarganya, bagi saya sulit untuk meningkatkan partisipasi perempuan jika dalam dirinya ataupun pola pikirnya berfikir bahwa pendidikan politik lokal itu tidak penting.*

Sedangkan Niken selaku remaja perempuan di Desa Pancanegara bahwa salah satu factor kurangnya partisipasi perempuan ialah: *Menurut saya kurangnya partisipasi perempuan dalam politik lokal di karenaka kurangnya pemerintah daerah ataupun pihak desa memberikan kegiatan-kegiatan atau sosialisasi tentang politik lokal terutama untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik lokal, pribadi saya sendiri sebagai perempuan, saya punya hobi dan kegiatan yang saya suka sendiri saya kurang minat bahkan tidak berminat dalam politik lokal apalagi menjadi seorang Kepala Desa di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Banten.*

Dari penjelasan di atas dibenarkan pula oleh Uswah selaku remaja perempuan Desa Pancanegara berikut penjelasannya:

*Menurut saya secara individu masing-masing setiap perempuan kita memiliki tujuan dan pekerjaan yang kita inginkan, saya sendiri juga kurang minat untuk terjun dalam politik lokal apalagi menjadi seorang Kepala Desa di Desa Pancanegara ini, saya sendiri lebih memilih kerja diluar. Selanjutnya Bapak Endik selaku Ketua RT di Desa Pancanegara berpendapat factor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi perempuan dalam politik lokal, berikut penuturan Bapak Endik: Menurut saya factor kurangnya partisipasi perempuan dalam politik lokal karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan lokal namun disini saya melihat bahwasannya masyarakat di Desa Pancanegara ini dalam perekonomiannya kurang, untuk kehidupan sehari-hari saja sudah pas-pasan, jadi bisa dibilang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya terutama anak perempuan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, jadi banyaknya anak remaja yang memilih kerja diluar karena pengetahuannya yang kurang, dan juga dari masyarakatnya yang memiliki pikiran bahwa perempuan baiknya mengeurus rumah ataupun lainnya ketimbang menjadi pemimpin sebagai kepala desa.*

Dari beberapa penjelasan di atas sebagai factor kurang partisipasinya perempuan dalam politik lokal, dwi sebagai salah satu remaja perempuan menjelaskan :

*Menurut saya factor mengapa perempuan di Desa Pancanegara ini kurang berminat untuk berpartisipasi dalam politik lokal apa lagi sebagai Kepala Desa di Desa Pancanegara karena factor lingkungan keluarganya ataupun masyarakatnya yang memandang laki-laki lebih baik menjadi seorang pemimpin ketimbang perempuan, dan juga pola pikir perempuan yang menyepelkan masalah pendidikan apa lagi pendidikan politik lokal menurut saya mereka kurang kepercayaan diri, dari pemerintah daerah pun kurang dalam kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik lokal.*

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi foto-foto yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter, data yang relevan penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan dokumentasi dengan cara pengambilan gambar selama pengambilan data berupa foto, dokumen lain seperti; dokumen kegiatan Pilkades, sejarah Desa Pancanegara dan letak geografis.

## **Pembahasan**

Pada uraian pembahasan ini peneliti akan menyajikan pembahasan sesuai dengan temuan penelitian sehingga temuan

ini akan disatukan dengan temuan yang ada sekaligus memodifikasi dengan teori yang ada. Maka peneliti akan membahas mengenai: Partisipasi Perempuan Dalam Kepemimpinan Sebagai Kepala Desa di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.

### **1. Partisipasi Perempuan Dalam Kepemimpinan Sebagai Kepala Desa Di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Banten**

Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan sebagai Kepala Desa di Desa Pancanegara masih sangat kurang, sesuai datayang di peroleh belum adanya kepala desa seorang perempuan di Desa Pancanegara ini, kurangnya kepercayaan diri seorang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin, kurangnya dukungan dari masyarakat, kurangnya pendidikan politik lokal.

Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka memberikan kontribusi pada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab untuk mencapainya.

partisipasi adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses

pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan Kebijakan umum.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan masyarakat desa pancanegara yaitu bapak Endik terkait partisipasi perempuan dalam kepemimpinan sebagai Kepala Desa Di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Banten.

Berikut penuturan dari beliau : partisipasi perempuan di Desa Pancanegara sangat kurang masyarakat disini terutama perempuan kurang minat untuk terjun ke dunia politik, perempuan disini masih sangat kurang dalam pendidikan mereka hanya tamat sampai SMA dan melanjutkan kerja keluar seperti pabrik ataupun memilih untuk menikah, masyarakat disini berfikir perempuan kurang untuk menjadi seorang pemimpin, mereka berpendapat pemimpin laki-laki dapat melaksanakan tugas nya dengan baik.

Sedangkan menurut masyarakat lain yaitu ibu kimal mengenai partisipasi perempuan dalam kepemimpinan sebagai Kepala Desa, berikut penuturan beliau : disini saya melihat bahwasannya para remaja perempuan kurang berpartisipasi

dalam politik lokal, pemerintah daerah ataupun kepala desa kurang dalam kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan jumlah partisipasi perempuan dalam politik lokal terutama menjadi seorang kepala desa, masalah perekonomian yang tidak mendukung untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Dari kesimpulan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa partisipasi perempuan di Desa Pancanegara masih sangat kurang bahkan belum ada sama sekali Kepala Desa perempuan di Desa Pancanegara, banyaknya perempuan di Desa Pancanegara kurang percaya diri untuk menjadi seorang pemimpin, Kepala Desa yang kurang melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan sebagai Kepala Desa.

## **2. Factor-faktor apa saja yang menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam Politik Lokal**

Perempuan juga dipersepsikan sebagai manusia yang memiliki kelemahan, keterbatasan, selalu menggunakan perasaan, dan tidak logis. Karenanya perempuan dianggap tidak layak bekerja disektor public yang “keras”, kompetitif, dan

rasional. Perempuan yang bekerja dipublik, membangun karir, dan berkompetisi dengan laki-laki dianggap menyalahi kodrat.

Keterlibatan perempuan dalam masa kepemimpinan kepala desa laki-laki baik diruang publik maupun politik disampingkan. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya perempuan terlibat dalam kegiatan desa, sedikitnya perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan adanya pandangan perbedaan gender didalam masyarakat sehingga menimbulkan bentuk ketidakadilan/ ketimpangan bagi perempuan di Desa Pancanegara baik di bidang kesehatan, pendidikan, partisipasi politik maupun ekonomi.

Peran perempuan dalam masa kepemimpinan kepala desa laki-laki lebih kepada urusan domestik dan pekerja rumah tangga tambahan.

Kurangnya perhatian dari pemerintah desa semakin membuat peran perempuan terpinggirkan. Partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan salah satu langkah nyata untuk mencapai kondisi yang adil bagi perempuan. Dengan hadirnya sosok pemimpin

perempuan akan merespon kepentingan perempuan dalam kebijakannya sehingga akan melahirkan kebijakan yang berkeadilan dan kesetaraan gender.

Minimnya keterwakilan perempuan di dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan di Indonesia menjadi persoalan ketika transisi menuju demokrasi menuntut kesetaraan dan keadilan perempuan. Kondisi sosiokultur bangsa yang pekat dengan budaya patriarki menjadi salah satu factor penghalang untuk aktualisasi perempuan sebagai pengambil Kebijakan pembangunan bangsa ini. Budaya patriarki menggambarkan tingginya dominasi laki-laki yang tidak memberikan kesempatan pada perempuan. Budaya ini mengaggap perempuan lemah dan lebih memposisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Dengan kondisi seperti ini, maka kemampuan finansial perempuan juga menjadi terbatas.

Adapun sebagai factor yang menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam politik lokal di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran tentu banyak sebab dimulai dari kurangnya kesadaran perempuan di Desa Pancanegara, kurangnya pendidikan politik, persepsi

masyarakat yang menilai perempuan kurang baik untuk menjadi pemimpin sebagai Kepala Desa, mayoritas perempuan di desa pancanegara kurang percaya diri untuk terlibat dalam kancah politik lokal tingkat desa yang berakibat kurangnya penyerapan aspirasi kepentingan kelompok perempuan tersebut, karena mereka memiliki pandangan bahwa perempuan hanya dapat berkiprah di ranah domestic dan masi dianggap tabu turut serta aktif di ranah politik.

Pendidikan politik bagi perempuan di Desa Pancanegara masih sangat rendah., hal tersebut dibuktikan bahwa kaum perempuan di desa pancanegara kurang mendapatkan pendidikan politik lokal.

Pendapat yang disampaikan oleh heru terkait penghambat kurangnya partisipasi perempuan dalam politik lokal antara lain sebagai berikut : kalau saya pribadi melihat kurangnya dukungan dari masyarakat dan lembaga yang menjadi tantangan dalam mendorong kepemimpinan perempuan. Dukungan yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin, kami perlu

bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, namun disini saya melihat dari pihak desa ataupun pemerintah daerah masi kurang dalam mengatasi kurangnya partisipasi perempuan dalam politik lokal di Desa Pancanegara ini.

### **3. Upaya dalam meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Kepemimpinan Sebagai Kepala Desa di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.**

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Banten dalam mengatasi kurangnya partisipasi perempuan dalam kepemimpinan sebagai kepala desa di desa pancanegara yaitu dengan cara mendorong perempuan terjun di dunia politik diantaranya adanya Kebijakan yang mengharuskan partai politik untuk menyertakan perempuan dalam dunia perpolitikan tanah air khususnya melalui pemilu legislative.

Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik lokal melakukan pelatihan dan pendidikan

salah satu cara untuk mendorong kepemimpinan perempuan ialah melalui pelatihan dan pendidikan. Ada berbagai pelatihan dan program pendidikan yang dapat diberikan kepada perempuan di desa. Ini termasuk keterampilan kepemimpinan, keterampilan komunikasi dan keterampilan menejemen waktu. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan ini, perempuan dapat membangun kepercayaan diri mereka dan siap untuk mengambil peran kepemimpinan dalam pembangunan desa.

Peningkatan kesadaran. Selain pelatihan dan pendidikan penting juga untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan desa. Ini dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran di desa atau melalui program lainnya. Meningkatkan kesadaran akan membantu mengubah sikap dan pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan.

Peningkatan aksesibilitas, penting juga untuk memperbaiki aksesibilitas perempuan terhadap sumber daya dan kesempatan. Hal ini dapat mencakup akses kependidikan,

pelatihan, dan sumber daya keuangan. Dengan meningkatkan aksesibilitas ini, perempuan akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan desa

Menurut Niken selaku salah satu perempuan dan masyarakat di desa pancanegara mengenai upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik lokal adalah sebagai berikut : upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan di desa pancanegara, saya pribadi masi merasa sangat kurang bahkan sayasendiri sebagai perempuan tidak pernah mendapatkan pelatihan dan pendidikan politik lokal. Peneliti menyimpulkan bahwa Kepala Desa ataupun Pemerintah Daerah masi belum sepenuhnya melakukan pelatihan ataupun memeberikan pendidikan politik terhadap masyarakat di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Banten.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang dengan judul “*Partisipasi Perempuan Dalam Kepemimpinan Sebagai Kepala Desa*”. Di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang

Banten. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan sebagai Kepala Desa di Desa Pancanegara, partisipasi perempuan dalam politik lokal masi sangat kurang karena kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, kurangnya kegiatan-kegiatan dari desa yang dapat meningkatkan partisipasi perempuan, yang terutama kurangnya kepercayaan diri dalam perempuan, adanya budaya patriarki dalam lingkungan masyarakat di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Banten.
2. Adapun sebagai factor penghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam politik lokal adalah stereotip gender, kurangnya dukungan, dan ketidak tahuan adalah beberapa factor penghambat yang dihadapi dalam mendorong kepemimpinan perempuan dalam pembanguna desa. Kurangnya kesadaran perempuan tentang pendidikan kurangnya kepercayaan diri, masyarakat yang melihat perempuan kurang dalam pembangunan desa. persepsi masyarakat yang menilai perempuan kurang baik untuk menjadi pemimpin sebagai kepala desa, mayoritas perempuan di desa

pancanegara kurang percaya diri untuk terlibat dalam kancah politik lokal tingkat desa yang berakibat kurangnya penyerapan aspirasi kepentingan kelompok perempuan tersebut.

3. Adapun upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan yaitu melakukan pelatihan dan pendidikan salah satu cara untuk mendorong kepemimpinan perempuan ialah melalui pelatihan dan pendidikan. Mencakup pelatihan dan pendidikan, peningkatan kesadaran, dan peningkatan aksesibilitas perempuan terhadap sumber daya dan kesempatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Dr. H.Abd Rasyid M, S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M. 2017. Politik Sosial & Kepemimpinan Wanita. Wade Group.
- Dr. Bukman Lian, M.M., M.Si. 2017. Kepemimpinan & Kualitas Kinerja Pegawai. Cv.Amanah .
- Dr. Hj. Eti Nurhayati, M.Si. 2012. *Psikologi Perempuan dalam berbagai Perspektif*. Pustaka Belajar. Edisi pertama
- Fitri Pratiwi 2015. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya. PT Visimedia Pustaka, Anggota IKAPI, Jakarta.
- Lusia Palulungan, M.ghufran H. kordi K. , Muhammad Taufan Ramli. 2020. *Perempuan. Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Yayasan bakti. Edisi pertama
- Prof. Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### Sumber Jurnal & Skripsi

- Ayu Indah Lestari. (2019). *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesionalitas Kepala Desa Perempuan Desa Dahu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Banten*. Universitas Banten Jaya.
- Calesna, Vernalia et al. 2020. "Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan Desa (Studi Pada Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalim Baru) Women's Participation in Village Institutions (Study at Village Office of Perpenden Kecamatan Kutalimbaru)." 2(2): 128–36. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/jipikom>.
- Hesty Vina Fauzi. (2020). *Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang*. Universitas Bnaten Jaya.
- Herni. (2021). *Kinerja Aparatur Desa Dalam Memberikan Pelayanan Republik Kepada Masyarakat Di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang*. Universitas

Banten Jaya.

Kollo Fredik Lambertus. 2017. “Budaya Patriarki Dan Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Politik.” *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* (November): 317.

Kontu. 2017. “Representasi Perempuan Dalam Politik Lokal Di Era Otonomi Daerah.” *Societas* 6(01): 34–46.

Mekarisce, Arnild Augina. 2020. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12(3): 145–51.

Palulungan, Lusiana, Muhammad Taufan Ramli, and M Ghufri. 2020. *BaKTI: Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*.

### **Sumber Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014  
Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014  
Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011  
Tentang Peraturan Daerah